**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN KELALAIAN
DOKTER PADA KLINIK KECANTIKAN DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Oleh :

Aulia Dwitasari¹, Ahmad Fauzi², Reine Rofiana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Serang, Banten

Email: ¹ 1111210182@untirta.ac.id, ² papawzi.abi@gmail.com ³ reine@untirta.ac.id

ABSTRACT

Beauty clinic is a health care facility engaged in the field of aesthetics that aims to provide outpatient health services and provide medical services, such as consultation, examination, treatment and medical actions related to beauty care, both for skin, face, and body shape with non-surgical processes. However, in practice it does not always go with what is expected, there are often acts of error or negligence from beauty clinic business actors in carrying out their services. . There are two identifications of the problem. First, how the legal protection of patients who are victims of doctor negligence in beauty clinics is reviewed based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. Second, how criminal law enforcement against negligent acts of doctors in beauty clinics. The research method used is normative juridical, the research specification uses a statutory approach. The theories used are legal protection theory and law enforcement theory. The results of the study show that legal protection for victims of doctor negligence in beauty clinics is still not fully fulfilled. Although Law Number 17 of 2023 concerning Health has regulated the practice of medicine, the regulation has not clearly regulated the form of legal remedies for victims. In addition, law enforcement officials tend to be passive and only act after reports from the public, so that repressive efforts in taking action against cases of medical negligence are still ineffective. Therefore, steps are needed such as revision of regulations, increased supervision by the Health Office, and education to the public so that patients can better understand their rights and negligent doctors can be given appropriate sanctions

Keywords: *Beauty Clinic, Legal Protection, Victims of Doctor Negligence*

ABSTRAK

Klinik kecantikan merupakan suatu sarana pelayanan kesehatan yang bergerak di bidang estetika yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan menyediakan jasa pelayanan medik, seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis yang berkaitan dengan perawatan kecantikan, baik untuk kulit, wajah, maupun bentuk tubuh dengan prosedur non bedah. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan apa yang diharapkan, sering terjadi tindakan kesalahan atau

kelalaian dari pelaku usaha klinik kecantikan dalam menjalankan pelayanannya. Terdapat dua identifikasi masalah. Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien korban kelalaian dokter pada klinik kecantikan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kedua, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan kelalaian dokter pada klinik kecantikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kelalaian dokter di klinik kecantikan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur praktik kedokteran, namun regulasi tersebut belum secara jelas mengatur mengenai bentuk pemulihan hukum bagi korban. Selain itu, aparat penegak hukum cenderung pasif dan hanya bertindak setelah adanya laporan dari masyarakat, sehingga upaya represif dalam menindak kasus kelalaian medis masih kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti revisi regulasi, peningkatan pengawasan oleh Dinas Kesehatan, serta edukasi kepada masyarakat agar pasien dapat lebih memahami hak-haknya dan dokter yang lalai dapat diberikan sanksi yang sesuai.

Kata kunci: Klinik Kecantikan, Perlindungan Hukum, Korban Kelalaian Dokter

1. PENDAHULUAN

Salah satu pelayanan kesehatan yang berkembang saat ini dan cenderung menjadi gaya hidup masyarakat modern adalah pelayanan kesehatan perseorangan, yaitu berkaitan dengan kesehatan estetika atau yang sering disebut sebagai klinik kecantikan.¹ Klinik kecantikan termasuk sebagai suatu sarana pelayanan kesehatan di bidang estetika yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyediakan jasa pelayanan medik seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis yang berkaitan dengan perawatan kecantikan, baik untuk kulit, wajah, maupun bentuk tubuh dengan prosedur non bedah.²

Dalam pemenuhan kebutuhan

pelayanan klinik kecantikan, tak bisa dipungkiri dapat timbul hal-hal yang merugikan pasien. Kerugian yang dialami oleh pasien dalam hal ini berupa terjadinya suatu akibat yang didapatkan setelah mendapatkan pelayanan medik dari dokter, baik yang didasarkan kepada kesalahan ataupun akibat kelalaian. Kelalaian dokter dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis yang dalam pelaksanaan kewajibannya menyimpang dari yang seharusnya.³ Terjadinya suatu kelalaian pada klinik kecantikan disebabkan akibat ketidakmampuan dari dokter dalam menjalankan kewajibannya terhadap hak hak pasien. Kewajiban dan hak daripada dokter dan pasien dianalogikan sebagai hubungan timbal

¹ Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik. Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia (Jakarta, Departemen Kesehatan RI, 2007): 1.

² Irvan Pryana. "Perbedaan Salon Kecantikan dan Klinik Kecantikan", <https://belirus.com/perbedaan-salon-kecantikan->

[dan-klinik-kecantikan/](#), diakses pada tanggal 28 September 2024, pukul 20.34 WIB.

³ Priharto Adi. "Formulasi Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2013): 267.

balik. Hak pasien merupakan kewajiban bagi dokter dan sebaliknya hak dokter adalah kewajiban dari pasien. Sejatinya dalam upaya pemulihan atau pengobatan dari dokter terhadap pasiennya dapat menghasilkan kesembuhan atau setidaknya meringankan beban penderitaan dari pasiennya.⁴

Kasus yang pernah terjadi akibat kelalaian dokter pada klinik kecantikan adalah kasus klinik kecantikan yang bernama Belle Beauty Care di Makassar. Korban yang bernama Agita Diola Fitria melakukan sebuah *treatment filler* hidung dan suntik pipi untuk tirus, namun setelah melakukan tindakan tersebut korban mengalami efek samping yang menyebabkan mata sebelah kirinya tidak bisa melihat dan korban juga mengalami muntah dan pingsan. Ditemukan fakta bahwa dokter yang menangani korban telah melakukan kelalaian dikarenakan dokter tersebut tidak memeriksa kondisi korban secara menyeluruh apakah korban mempunyai penyakit atau alergi obat sebelum melakukan tindakan, serta dokter juga tidak membuat *informed consent* tertulis atau penyampaian prosedur dan persetujuan tindakan medis kepada pasien sebelum melakukan tindakan *filler* hidung dan suntik pipi untuk tirus.⁵

Kasus selanjutnya yaitu seorang dokter pada klinik kecantikan di Medan yang bernama Rudy Haryono, diduga lalai sehingga mengakibatkan luka di wajah pasiennya, Erna Juliyanti Lase. Saat itu korban ingin melakukan perawatan wajah dengan terapi sinar wajah. Namun, korban justru mengalami iritasi berat dengan kulit wajah melepuh seperti terbakar setelah *treatment* dilakukan. Sebelumnya korban sempat merasakan panas dan perih saat di laser tetapi pelaku mengatakan tidak apa-apa. Terekam kamera CCTV pelaku masih

fokus kepada *game online* yang dimainkannya saat melakukan *treatment* pada wajah korban, sehingga dokter tersebut lupa untuk memasang tipe lensa filter laser CO2. Akibatnya, wajah korban mengalami iritasi berat dengan kulit wajah melepuh seperti terbakar.

Tindakan kelalaian yang telah dilakukan tentu menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban. Kasus perihal kelalaian dokter yang terjadi seringkali berujung kepada penderitaan pasien. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji bagaimana upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien, terutama yang menyangkut masalah hak dan kewajiban para pihak, pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kelalaian berupa gugatan ganti rugi melalui MKDKI dan dugaan tindak pidana pada pengadilan. Disebutkan dalam Pasal 305 Ayat (1) diatur suatu keadaan dimana terjadi kesalahan yang melibatkan tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat diajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) oleh setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan. Namun, pada praktiknya penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Misalnya korban merasa diabaikan hak-haknya, dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lainnya. Oleh karena itu pada kasus kelalaian dalam

⁴ Sumirahayu Sulaiman, Soni Fino Bahari, dkk. "Konsekuensi Hukum Terhadap Malpraktek dalam Kedokteran". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 6 (2024): 2197.

⁵ Muhammad Khaidir. "Perawatan Hidung Mancung, Perempuan di Makassar Malah Alami

Buta Permanen", <https://sulsel.inews.id/berita/perawatan-hidung-mancung-perempuan-di-makassar-malah-alami-buta-permanen>, diakses pada tanggal 29 September 2024, pukul 22.35 WIB.

praktik medik, perlu adanya upaya perlindungan hukum agar hak-hak pasien sebagai korban tidak terabaikan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara menggunakan pikiran dengan hati-hati untuk mencapai suatu tujuan. Metode ini mencakup mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis informasi sebelum menyusun laporan.⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, merupakan metode yang menempatkan hukum sebagai suatu konsep tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas.⁸ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Kelalaian Dokter Pada Klinik Kecantikan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Seorang dokter dalam praktiknya di klinik kecantikan mungkin saja melakukan kesalahan ataupun kelalaian, yang mana

tindakan tersebut dapat memberikan kerugian terhadap pasien, baik kerugian yang fatal maupun tidak. Sehingga dalam hal ini, perlu adanya perlindungan hukum guna menunjang hak-hak dari para korban kejahatan.

Sebagai contoh kasus mengenai kelalaian dokter dalam melakukan praktik medis pada klinik kecantikan yang pernah terjadi yaitu, pelaku usaha yang bernama Elisabeth Susana merupakan seorang lulusan dokter yang mempunyai usaha klinik kecantikan yang bernama Belle Beauty Care di Makassar. Korban akibat dari tindakan pelaku usaha yaitu Agita Diola Fitria yang melakukan perawatan kecantikan berupa *treatment filler* hidung dan suntik pipi untuk tirus. Pada hari Jumat tanggal 15 September, korban datang untuk melakukan perawatan kecantikan, akan dilakukan *treatment* guna merampingkan bagian pipi korban terlebih dahulu selanjutnya dilakukan penyuntikan *filler* pada hidung korban agar terlihat lebih mancung. Namun setelah mendapatkan tindakan tersebut korban mengalami efek samping yang menyebabkan mata sebelah kirinya tidak bisa melihat. Korban kemudian melaporkan hal tersebut kepada organisasi profesi terkait yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan dugaan sebelum melakukan tindakan tersebut, dokter Elisabeth tidak membuat Standar Prosedur Operasional (SOP) penyuntikan *filler* hidung yang berfungsi sebagai Panduan Praktik Klinik (*Clinical Practice*

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2010): 1.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014): 18.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012): 118.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984): 20.

Guidelines) bagi tenaga medis dalam melaksanakan tindakan kedokteran.¹⁰

Korban selanjutnya yaitu terdapat pada klinik Cantik Mutiara Berkat, korban bernama Erna Juliyanti Lase yang melakukan *treatment* pada tanggal 19 Maret 2021 mengalami iritasi berat dengan kulit wajah melepuh seperti terbakar setelah *treatment* dilakukan. Rudy Haryono selaku dokter yang menangani Erna, diduga telah lalai dalam melakukan praktiknya, dokter tersebut terekam kamera cctv sedang bermain *game online* saat sedang melakukan *treatment* laser CO2 sehingga lupa untuk memasang tipe filter laser CO2 yang berujung mengakibatkan kerugian terhadap pasien, sehingga pasien harus mengalami iritasi pada wajah.

Pada kasus-kasus di atas, perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tidak sepenuhnya terpenuhi. Pada kasus korban yang bernama Agita, korban mengalami kebutaan pada mata sebelah kirinya akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh dokter Elisabeth pada saat melakukan praktik medis, setelah dilakukan persidangan, dokter terkait justru mendapatkan putusan bebas dan terbukti tidak bersalah atas tindakan yang telah dilakukan. Agita selaku korban tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Kemudian pada kasus Erna Juliyanti yang mendapatkan luka bakar pada wajahnya, pelaku yaitu dokter Rudy justru tidak memberikan tanggungjawab berupa ganti rugi ataupun pemulihan terhadap luka korban.

Hak dan kewajiban korban dari kelalaian dokter selaku pasien pada klinik kecantikan didasari oleh adanya hubungan hukum antara korban dengan pemberi jasa pelayanan kesehatan yaitu tenaga medis (dokter) yang dalam hal ini merupakan pelaku usaha pada klinik kecantikan. Kedudukan tenaga medis (dokter) dan pasien adalah sama, karena dokter merupakan pihak yang menawarkan jasa medis kecantikan, sedangkan pasien merupakan pihak yang menggunakan jasa medis kecantikan tersebut. Dari kedua kasus di atas dapat dilihat bahwa perlindungan hukum yang merupakan salah satu hak bagi korban kelalaian dokter pada saat ini masih minim untuk bisa didapatkan oleh korban.

Perlindungan hukum merupakan seluruh upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat, dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merumuskan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kelalaian praktik medis yaitu berupa pemberian hak kepada korban untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan kelalaian praktik

berlapis, diakses pada tanggal 05 November 2024, pukul 19.31 WIB.

¹¹ Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cet. Ke-1. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2021): 63.

¹⁰ Hasan Basri. "Pasiennya Buta Permanen, Dokter Pemilik Klinik Kecantikan Belle Beauty Care Didakwa Pasal Berlapis, <https://makassar.tribunnews.com/2020/03/04/pasiennya-buta-permanen-dokter-pemilik-klinik-kecantikan-belle-beauty-care-didakwa-pasal->

medis, memberikan restitusi atas kerugian yang timbul karena kelalaian dokter melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Restitusi mengarah kepada tanggung jawab dokter terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian dalam melaksanakan praktiknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban. Muatan restitusi bagi pasien yang menjadi korban kelalaian dokter dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

Disebutkan dalam Pasal 305 Ayat (1) diatur suatu keadaan dimana terjadi kesalahan yang melibatkan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam hal ini oleh dokter, dapat diajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) oleh setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan. Menurut pasal 308 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan, pasien yang menjadi korban kelalaian dokter dapat mengadukan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan untuk memperoleh restitusi dengan berdasarkan surat rekomendasi yang diberikan oleh MKDKI. Merujuk kepada Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran, mengatakan bahwa aduan atau keputusan MKDKI tidak menghapuskan hak aduan atau laporan kasus dugaan kelalaian medis kepada pihak aparat penegak hukum. Pasien yang merasa dirugikan akibat tindakan dokter boleh melakukan aduan kepada majelis MKDKI maupun aduan atau kepada pihak aparat yang berwenang. Akan tetapi mengenai penentuan ada atau tidaknya pelanggaran

atau penyimpangan etik, penyimpangan disiplin profesional kedokteran dan penyimpangan dibawah undang-undang berada dibawah kuasa majelis MKDKI.¹²

Mekanisme aduan tuduhan dan penyelidikan mengenai adanya dugaan pelanggaran disiplin diantaranya yaitu MKDKI menerima aduan dari pasien ataupun masyarakat, dan melakukan selidikan atas aduan tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran etika, maka aduan oleh MKDKI diteruskan kepada MKEK sebagai majelis yang berwenang melakukan pemeriksaan sekaligus penjatuhan sanksi kepada dokter yang telah melakukan pelanggaran etika. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kesalahan dalam penerapan disiplin keilmuan, maka MKDKI akan menjatuhkan hukuman disiplin seperti penggantungan izin praktik selama waktu tertentu, maupun pembatalan izin praktik medis selamanya. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan sesebuah fakta bahwa dokter telah melakukan pelanggaran atau kesalahan dibawah Undang-Undang, semisal menyebabkan kecederaan bahkan kematian, maka MKDKI akan meneruskannya kepada pihak yang berwenang dengan mengeluarkan surat keputusan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini merupakan bentuk perlindungan kepada pasien korban kelalaian dokter yang diamanahkan oleh Undang-Undang Kesehatan.

Adanya perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sedangkan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum adalah dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri

¹² Sapta Aprilianto. "Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Terhadap

Dugaan Kelalaian Medis Dokter". *Jurnal Yuridika*, Vol. 30 No. 3 (2015): 536.

untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Tindakan atas dasar kelalaian seorang dokter dalam menjalankan profesi, praktik, pengetahuan dan ketrampilannya yang biasa digunakan dalam mengobati pasien bisa menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan atau kehidupan pasien karena tidak sesuai dengan standar profesi medik serta menggunakan keahlian untuk kepentingan pribadi. Berkaitan dengan permasalahan tersebut serta bagaimana sistem hukum pidana bekerja untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban kelalaian medis agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dan melindungi masyarakat luas agar tidak lagi menjadi korban kelalaian medis termasuk melindungi hak-hak pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, perlindungan hukum termanifestasi dalam berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh seluruh aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum juga terwujud dalam kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan terhadap korban pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara umum, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada individu korban kejahatan juga berarti melindungi masyarakat, karena keberadaan individu dalam hal ini merupakan bagian dari terbentuknya masyarakat, dengan kata lain masyarakat terdiri dari individu-individu, sehingga masyarakat dan individu mempunyai akibat yang saling berhubungan.¹³

Apabila pasien atau keluarga pasien mengalami kerugian akibat dokter yang

telah melakukan kelalaian praktik medis dapat mengadukan kepada Kepolisian, Jaksa, Dinas Kesehatan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan dan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan Negeri setempat, berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara dan secara pidana dapat dituntut dengan Pasal 359, 360 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kelalaian Dokter Pada Klinik Kecantikan

Beberapa kasus yang terjadi mengenai kelalaian praktik medis oleh dokter saat ini jumlah yang terungkap hanyalah bagian kecil dari keseluruhan masalah. Banyak tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya bisa jadi merupakan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat, tetapi tidak dikejar secara hukum. Bagi masyarakat, hal ini menggambarkan bahwa penegak hukum cenderung tidak mendukung pasien, terutama bagi masyarakat yang memiliki posisi sosial yang tidak sebanding dengan tenaga medis.

Seperti pada kasus dokter Elisabeth yang justru memperoleh putusan bebas yang mana sebelumnya terbukti telah melakukan kelalaian saat melaksanakan praktik medis, dimana pelaku tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan secara lengkap berupa wawancara (anamnesis) tentang riwayat penyakit/kesehatan pasien, riwayat pengobatan, alergi obat atau alergi makanan tertentu dan hal lainnya yang berkaitan dengan kesehatan pasien, dr. Elisabeth juga tidak melakukan pemeriksaan fisik umum yakni pemeriksaan tensi, nadi, pernafasan, tidak melakukan pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan laboratorium sederhana antara lain pemeriksaan darah rutin dan urine

¹³ J.Guwandi. *Dokter Pasien dan Hukum*. (Jakarta, Fakultas Kedokteran UI, 1996): 9.

lengkap dalam memberikan pelayanan medis, sehingga luput menemukan kelainan/penyakit/penyulit yang kemudian berpengaruh buruk kepada pasien ketika dilakukan tindakan medis penyuntikan *filler* hidung, akan tetapi langsung menyuntikkan *filler* ke hidung korban yang mana akibat dari penyuntikkan tersebut menyebabkan korban mengalami kebutaan pada mata sebelah kiri.

Kasus berikutnya yaitu pada klinik Cantika Mutiara Berkat, dimana dokter Rudy telah melakukan kelalaian saat melaksanakan praktiknya yaitu melakukan praktik diiringi dengan bermain *game online*, dan berdasarkan kesaksian yang ada, hal tersebut sudah sering dilakukan. Akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh dokter Rudy bermain *game online* saat sedang melakukan praktik adalah dokter Rudy lupa memasang tipe lensa filter laser CO2 dan menyebabkan wajah seorang pasien yang bernama Erna Juliyanti Lase mengalami iritasi berat dengan kulit wajah melepuh seperti terbakar. Atas kerugian tersebut, pasien pergi ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, pihak Dinkes mengatakan apa yang dilakukan dokter Rudy sudah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) praktik kedokteran. Kemudian pasien menempuh jalur hukum melapor kepada Polrestabes Medan. Namun mengenai laporan tersebut belum ada titik terang hingga saat ini. Pelaku yakni dokter Rudy hanya diberhentikan dari klinik tempat ia melakukan praktik. Tidak ada bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku terhadap korban.

Secara garis besar, pelanggaran dalam kasus kelalaian di bidang kesehatan terjadi ketika kepercayaan pasien dalam hubungan terapeutik dilanggar. Kepercayaan tersebut mewakili tanggung jawab tenaga kesehatan untuk bertindak secara optimal, hati-hati, teliti, menghindari kesalahan, melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan dengan sepenuhnya, serta menghindari tindakan yang seharusnya tidak dilakukan.

Penegakan hukum merupakan unsur yang penting dalam suatu sistem hukum yang mementingkan penerapan hukum negara berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk mencapai keadilan dalam kehidupan masyarakat serta dalam menjalankan negara. Hal ini menandakan bahwasanya seluruh aktivitas terkait dengan usaha untuk menjalankan, menjaga, dan menegakkan hukum sangatlah penting agar hukum tetap mempunyai nilai serta peranannya sebagai panduan untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat.

Penegakan hukum terhadap kasus kelalaian dokter pada klinik kecantikan merujuk kepada penggunaan serta penerapan peraturan dan sanksi di ranah hukum pidana dengan maksud memaksa pelaku untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Ini juga mencakup penerapan sanksi terhadap tenaga kesehatan yang melakukan tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Ada tiga aspek yang penting dalam penegakan hukum terkait kelalaian praktik medis, yaitu kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Dengan kepastian hukum, layanan kesehatan dapat dijalankan dengan lebih teratur, sementara masyarakat berharap untuk mendapat manfaat dari penerapan hukum ini. Dalam pelaksanaannya, masyarakat menginginkan bahwa hukum juga memberikan keadilan sesuai dengan kepentingan mereka.

Sebagai seorang dokter merupakan tugas yang tidak mudah karena terdapat sejumlah dokter di seluruh dunia yang kadang-kadang melakukan kesalahan dalam praktik medis mereka, menyebabkan kesalahan dalam perawatan kecantikan yang dapat berujung pada kecacatan atau kematian pasien. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pihak dokter terhadap pasien, penting untuk menetapkan tanggungjawab hukum secara pidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum pidana bagi dokter yang terlibat dalam kesalahan medis dapat diatur sesuai dengan Pasal 474 KUHP

pada ayat (1), (2), dan (3). Ini berarti bahwa dokter yang secara kelalaian menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian pada pasien dapat diproses secara hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak korban yang telah menjadi korban dari kesalahan medis yang dilakukan oleh dokter pada klinik kecantikan.

Penegakan hukum dalam kasus kelalaian dokter di klinik kecantikan sangat bergantung kepada lima faktor utama yang saling terkait, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Faktor hukum yang jelas dan ketat sangat penting dalam memastikan bahwa tindakan kelalaian medis yang dilakukan dokter dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa regulasi yang tegas, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif. Faktor penegak hukum, yaitu aparat seperti polisi, kejaksaan, dan hakim, harus bertindak profesional dan memahami standar medis dengan baik agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Dalam hal ini, penegakan hukum yang adil akan sangat bergantung pada kemampuan aparat untuk menilai bukti dan fakta secara objektif, seperti dalam kasus dokter Elisabeth dan dokter Rudy Haryono.

Selanjutnya, faktor sarana dan fasilitas juga memainkan peran penting dalam membuktikan kesalahan dokter. Tanpa adanya bukti yang kuat, seperti rekam medis atau rekaman CCTV, proses hukum akan sulit untuk berjalan dengan transparan dan adil. Hal ini mempertegas pentingnya penggunaan teknologi dan dokumentasi yang baik dalam setiap prosedur medis. Faktor masyarakat berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum pasien dan korban malpraktik untuk berani melaporkan kejadian kelalaian medis. Kesadaran ini harus terus ditingkatkan agar lebih banyak korban yang merasa terlindungi dan dapat menuntut keadilan. Terakhir, faktor kebudayaan yang sering kali menempatkan dokter pada posisi yang sangat dihormati harus diubah agar

masyarakat tidak ragu untuk menuntut pertanggungjawaban ketika terjadi kelalaian medis. Dengan saling terhubungnya lima faktor ini, penegakan hukum dalam kasus kelalaian dokter dapat lebih efektif, memberikan keadilan bagi korban, dan memastikan bahwa sistem kesehatan di Indonesia semakin aman dan terpercaya.

Tindak pidana praktik kedokteran hanya terjadi dalam konteks tindak pidana berbasis materiil (KUHP), yang mengacu pada perbuatan melarang terjadinya konsekuensi tertentu dan diancam dengan sanksi pidana. Terjadinya konsekuensi tersebut menjadi syarat esensial dalam menyelesaikan perbuatan pidana. Dalam konteks kelalaian praktik kedokteran, konsekuensi yang menjadi elemen krusial adalah kematian, cedera, serius, rasa sakit yang signifikan, penyakit akibat cedera, atau cedera yang mengganggu fungsi tugas dan pencarian seseorang. Dalam KUHP, tindakan yang secara tidak sengaja menyebabkan orang lain menderita cedera serius atau kematian dirinci dalam Pasal 359 dan 360. Unsur-unsur dalam pasal 359 dan 360 adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan unsur kelalaian (culpa);
- b. Keberadaan tindakan khusus;
- c. Keberadaan konsekuensi cedera serius atau kematian seseorang;
- d. Keberadaan hubungan sebab-musabab antara tindakan khusus dengan konsekuensi kematian orang lain tersebut.

Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh dokter pada klinik kecantikan merupakan suatu hal yang penting. Dalam rangka penegakan hukum yang harus dilakukan sebagaimana mestinya terlebih dalam memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum sendiri, maka penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka menyelaraskan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, melibatkan konsep-konsep yang saling terkait dalam penegakan hukum pidana. Penegakan hukum terhadap tindakan kelalaian oleh

dokter saat melakukan praktik medis secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara preventif yang lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan represif yang lebih pada pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana.¹⁴

Upaya represif adalah satu upaya penegakan hukum yang menitikberatkan kepada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu penerapan sanksi yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Tindakan represif yang dimaksudkan dalam kasus kelalaian medis oleh dokter ini adalah setiap proses peradilan hukum pidana mulai dari tahap formulasi, tahap aplikasi, hingga tahap eksekusi. Namun dalam praktiknya upaya-upaya represif ini kurang dapat berjalan dikarenakan dalam menangani hal ini aparat penegak hukum lebih bersikap pasif artinya menunggu laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan baru dapat dilakukan penyelidikan. Oleh karena itu sebagai lembaga yang berwenang mengawasi Dinas Kesehatan seharusnya dapat melakukan tindakan seperti pembinaan terhadap dokter yang menjalankan praktik kedokteran. Kemudian dalam menjalankan tindakan represif tersebut Dinas Kesehatan juga harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Sehingga aparat penegak hukum dapat proaktif dalam menyikapi adanya kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter, dalam hal ini diharapkan aparat penegakan hukum serta instansi terkait dapat meningkatkan penanganan dan pengembangan terhadap setiap laporan tentang kelalaian medis yang terjadi sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi.

Sedangkan upaya preventif adalah cenderung dengan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Seperti adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2023 tentang Kesehatan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan terkait hal-hal kedokteran dan praktiknya, ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah kasus-kasus kelalaian medis dalam praktik kedokteran. Selain itu juga upaya preventif dapat berupa pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang dunia kecantikan. Supaya masyarakat dapat membedakan dan menambah pengetahuan masyarakat bahwa klinik kecantikan yang legal akan memasang izin klinik kecantikan secara umum dan mempunyai nomor izin yang diletakan dalam papan nama klinik kecantikan yang tersedia dalam ruang tunggu atau di ruang pendaftaran klinik kecantikan, serta masyarakat juga bisa mengecek melalui review yang tertera dalam internet mengenai klinik kecantikan maupun dokter yang bekerja di klinik kecantikan tersebut, sebelum masyarakat pergi ke klinik kecantikan.

4. PENUTUP

1. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tidak sepenuhnya terpenuhi. Pada kasus korban yang Agita, korban mengalami kebutaan pada mata sebelah kirinya akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh dokter Elisabeth pada saat melakukan praktik medis, setelah dilakukan persidangan, dokter Elisabeth justru mendapatkan putusan bebas dan terbukti tidak bersalah atas tindakan yang telah dilakukan. Agita selaku korban tidak mendapatkan ganti rugi atau restitusi atas kerugian yang dideritanya. Kemudian pada kasus Erna Juliyanti yang mendapatkan luka bakar pada wajahnya, pelaku yaitu dokter Rudy justru tidak memberikan tanggungjawab berupa ganti kerugian ataupun pemulihan terhadap luka korban.

¹⁴ Beatrice Christasya, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan", *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 1 (2024): 13.

2. Berdasarkan dua contoh kasus tersebut bahwa perlindungan hukum yang merupakan salah satu hak bagi korban kelalaian dokter pada saat ini masih tidak terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Seharusnya pasien berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila menjadi korban kelalaian medis, dan juga dokter yang melakukan kelalaian dalam menjalankan praktik medis, seperti yang terjadi pada klinik kecantikan, dapat dikenakan sanksi hukum.
3. Kelalaian medis yang merugikan pasien berpotensi untuk menimbulkan tuntutan pidana atau perdata, dimana pasien berhak untuk memperoleh restitusi atas kerugian yang dideritanya. Pelanggaran dalam kasus kelalaian dibidang kesehatan terjadi ketika kepercayaan pasien dalam hubungan terapeutik dilanggar. Kepercayaan tersebut mewakili tanggung jawab tenaga kesehatan untuk bertindak secara optimal, hati-hati, teliti, menghindari kesalahan, melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan dengan sepenuhnya, serta menghindari tindakan yang seharusnya tidak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2010). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik. (2007). *Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

J.Guwandi. (1996). *Dokter Pasien dan Hukum*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.

Rena Yulia. (2021). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel dari Jurnal

Beatrice Christasya, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan" *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 1.

Sapta Aprilianto. (2015). "Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Terhadap Dugaan Kelalaian Medis Dokter" *Jurnal Yuridika*, Vol. 30 No. 3.

Priharto Adi. (2013). "Formulasi Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2.

Sumirahayu Sulaiman, Soni Fino Bahari, dkk. (2024) "Konsekuensi Hukum Terhadap Malpraktek dalam Kedokteran" *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 6.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Web Page

Hasan Basri. "Pasiennya Buta Permanen, Dokter Pemilik Klinik Kecantikan Belle Beauty Care Didakwa Pasal Berlapis".
<https://makassar.tribunnews.com/202>

0/03/04/pasiinya-buta-permanen-dokter-pemilik-klinik-kecantikan-belle-beauty-care-didakwa-pasal-berlapis. Diakses pada tanggal 05 November 2024, pukul 19.31 WIB.

Irvan Pryana. “Perbedaan Salon Kecantikan dan Klinik Kecantikan”. <https://belirus.com/perbedaan-salon-kecantikan-dan-klinik-kecantikan/>. Diakses pada tanggal 28 September 2024, pukul 20.34 WIB.

Muhammad Khaidir. “Perawatan Hidung Mancung, Perempuan di Makassar Malah Alami Buta Permanen”. <https://sulses.inews.id/berita/perawatan-hidung-mancung-perempuan-di%20makassar-malah-alami-buta-permanen>. Diakses pada tanggal 29 September 2024, pukul 22.35 WIB.